

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, H., & Uhbiyanti, N. (1991). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adhanita, S. (2013). Pengembangan Batik Jambi Motif Sungai Penuh sebagai Bentuk Kontribusi pada Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(4), 381–392.
- Aliyah, U. (2003). *Rencana Strategis Peningkatan Hunian Ruang Shofa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan (Pendekatan Force Field Analysis) (Tesis)*. Universitas Airlangga.
- Andiny, P., & Sari, M. G. P. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2(2), 116–125.
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik (VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arisman. (2018). Determinant of Human Development Index in Southeast Asia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 2(2), 118–137.
- Azahari, A. (2000). Pembangunan Sumberdaya Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 15(1), 56–69.
- Baeti, N. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 85–98.
- Bandiyono, A. (2018). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Fungsi terhadap Peningkatan IPM dan Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh). *Jurnal Info Artha*, 2(1), 11–28.
- Cahill, M. B. (2014). Is the Human Development Index Redundant? *Eastern Economic Journal*, 31(1), 1–5.
- Darsyah, M. Y. (2014). Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pendekatan K-Nearset Neighbor. *Seminar Nasional Pendidikan, Sains Dan Teknologi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang*, 29–35.
- David, F. R. (2009). *Manajemen Strategis Konsep (X)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Destilluna, F. G., & Zain, I. (2015). Pengaruh dan Pemetaan Pendidikan, Kesehatan, serta UMKM terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel dan Biplot. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(2), 292–298.

- Djuwariyah, & Muqit, A. (2015). Paradigma Pendidikan Sistemik-Organik: Sebuah Upaya Inovatif Dalam Pendidikan. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 9(2), 311–338.
- Ekosiswoyo, R., Kardoyo, & Raharjo, T. J. (2010). Strategi Akselerasi Pencapaian IPM Bidang Pendidikan untuk Mendukung Keberhasilan Pembangunan Jangka Menengah Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 1(2), 23–33.
- Fransisco, Firdaus, M., & Mulatsih, S. (2019). Strategi Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ipm Di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2), 1–13.
- Hambali. (2016). Pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas baru di kabupaten seluma pasca pemekaran. *Jurnal Manajer Pendidikan*, 10(1), 20–28.
- Harliyani, E. M., & Haryadi, H. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3 SE-), 129–140.
- Herrero, C., Martínez, R., & Villar, A. (2012). A Newer human development index. *Journal of Human Development and Capabilities*, 13(2), 247–268.
- Ihsan, F. (2013). *Dasar-dasar Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Khodabakhshi, A. (2011). Relationship between GDP and Human Development Indices in India. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 2(3), 251–253.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1(2), 202–216.
- Lestari, W. W., & Sanar, V. E. (2018). Analysis Indicator of Factors Affecting Human Development Index (IPM). *Geosfera Indonesia*, 2(1), 11–18.
- Magta M. (2013). Konsep Pendidikan KI Hajar Dewantara pada Anak Usia Dini. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 7(2), 221–132.
- Mahendra, R., Fariyanti, A., & Falatehan, A. F. (2016). Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan Melalui Alokasi Belanja Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(2), 1–19.
- Mahulauw, A. K. (2016). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan dan Pendidikan serta Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Tesis)* (Universitas Brawijaya).

- Maulana, R., & Bowo, P. A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Teknologi Terhadap Ipm Provinsi Di Indonesia 2007-2011. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 6(2), 163–169.
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni Pomits*, 2(2), 237–242.
- Mirza, D. S. (2015). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 4(2), 102–113.
- Nandita, D. A., Alamsyah, L. B., Jati, E. P., & Widodo, E. (2019). Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB di Provinsi DIY Tahun 2011-2015. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 2(1), 42–52.
- Patriotika, P. M. (2011). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat (Tesis)*. Institut Pertanian Bogor.
- Perwira, Y., Hasugian, P. M., & Marpaung, E. A. . (2020). Pelatihan Tata Kelola Media Pembelajaran Multimedia Berbasis Computer Based Instruction untuk Meningkatkan Kualitas Pengajaran Guru di SMK AKP Galang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 307–315.
- Radovanovic, B. (2011). Human development index as a measure of human development. *Filozofija i Društvo*, 22(3), 193–208.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sangereng, W., Engka, D. S. ., & Sumual, J. I. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun (2005-2019). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03), 60–71.
- Sitorus, Y. M., & Yuliana, L. (2018). Penerapan Regresi Data Panel Pada Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Produktifitas Ekonomi Provinsi-Provinsi Di Luar Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Media Statistika*, 11(1), 1–15.
- Sugiarta, I. M., Mardana, I. B. P., Adiarta, A., & Artanayasa, W. (2019). Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara (Tokoh Timur). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 2(3), 124–136.
- Sugiarto, & Kurniawan, R. (2015). *Pemetaan Indeks Pembagunan Pendidikan Di Indonesia (Laporan Penelitian Dosen STIS)*. Jakarta.
- Sukarsa, M. (2012). Pemetaan Kualitas Pendidikan Di Propinsi Bali Berbasis Spatial. *Majalah Ilmiah Teknologi Elektro*, 8(1), 6–11.
- Sunarya, I. W. (2016). Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia di Provinsi Bali Tahun 2011-2014. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 14(3), 577–584.

- Supriyanto, S., & Damayanti, N. A. (2007). *Perencanaan & Evaluasi*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Terunanegara, I. P., Agusdin, & Suparman, L. (2017). Analisis Kebutuhan Pengembangan Sumberdaya Manusia setelah Penerapan SMM ISO 9001: 2008 di Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram. *Jurnal Magister Manajemen*, 1–14.
- Tirtarahardja, U., & La Sulo, S. L. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. , (2003).
- Yanuarta, H. (2009). *Strategi alokasi anggaran pembangunan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lampung Barat (Tesis)* (Institut Pertanian Bogor).

LAMPIRAN

TABEL NILAI KEKUATAN FAKTOR PENDORONG WILAYAH DARATAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kekuatan											Rata-Rata	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketena gan	PGRI	Kepala Bappel itbang da	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekososbud	Kasubid DokRen		Kasubid Ekososbud
1	Daya tampung sekolah terhadap siswa yang telah memadai	4	4	5	3	4	3	4	5	3	4	4	3	3,83
2	Jaringan internet dan jaringan listrik yang cukup baik dan dapat mendukung proses pembelajaran	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4,08
3	Program bantuan seragam sekolah secara gratis untuk siswa miskin	4	2	5	3	4	4	5	4	2	5	3	3	3,67
4	Rasio Guru terhadap siswa yang melebihi standar pelayanan minimal dari Kemendikbud	4	4	5	2	4	5	4	4	4	5	5	3	4,08
5	Aksesibilitas transportasi yang baik sehingga peserta didik mudah dalam menjangkau lembaga pendidikan yang diinginkan	3	3	5	3	4	5	5	4	3	4	4	4	3,92
6	Mayoritas lembaga pendidikan semua jenjang telah terakreditasi sesuai data dari Badan Akreditasi Nasional	3	2	5	4	4	3	4	4	5	3	4	4	3,75
7	Pendidikan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD tiap tahun	4	3	5	5	4	4	3	5	5	3	5	4	4,17

TABEL NILAI KEMUDAHAN MENGENDALIKAN FAKTOR PENDORONG WILAYAH DARATAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kemudahan Mengendalikan											Rata-Rata	Jml	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketenagaaan	PGRI	Kepala Bappelit bangda	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekosobud	Kasubid DokRen			Kasubid Ekosobud
1	Daya tampung sekolah terhadap siswa yang telah memadai	3	3	5	3	5	3	3	4	4	3	4	5	3,75	3,79
2	Jaringan internet dan jaringan listrik yang cukup baik dan dapat mendukung proses pembelajaran	3	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	4	3,08	3,58
3	Program bantuan seragam sekolah secara gratis untuk siswa miskin	4	2	5	3	4	4	5	5	2	4	3	4	3,75	3,71
4	Rasio Guru terhadap siswa yang melebihi standar pelayanan minimal dari Kemendikbud	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3,58	3,83
5	Aksesibilitas transportasi yang baik sehingga peserta didik mudah dalam menjangkau lembaga pendidikan yang diinginkan	4	3	4	3	5	4	3	3	3	3	4	4	3,58	3,75
6	Mayoritas lembaga pendidikan semua jenjang telah terakreditasi sesuai data dari Badan Akreditasi Nasional	3	3	3	4	5	3	3	3	3	3	3	4	3,33	3,54
7	Pendidikan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD tiap tahun	5	3	5	3	4	5	4	4	3	5	5	4	4,17	4,17

TABEL NILAI KEKUATAN FAKTOR PENGHAMBAT WILAYAH DARATAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kekuatan											Rata-Rata	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketena gan	PGRI	Kepala Bappel itbang da	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekososbud	Kasubid DokRen		Kasubid Ekososbud
1	Proses modernisasi di daerah perkotaan sehingga adab dan rasa hormat siswa ke guru semakin memudar	3	4	4	3	2	5	4	4	3	4	4	4	3,67
2	Penyebaran Guru belum merata ke wilayah pedalaman dan daerah yang jaraknya jauh dari kota Benteng	5	4	4	3	2	5	5	5	5	4	3	4	4,08
3	Kompetensi guru yang belum optimal bila dilihat dari nilai UKG tahun 2019	4	3	3	2	2	3	4	3	5	3	5	4	3,42
4	Terdapat kesenjangan kualitas pembelajaran dan sarana prasarana sekolah antara perkotaan benteng dengan perdesaan	4	2	5	3	2	5	5	5	4	4	2	4	3,75
5	Tidak ada tunjangan tambahan untuk guru daerah terpencil dan daerah pelosok di kecamatan daratan	2	3	5	2	2	5	3	5	3	3	3	4	3,33
6	Anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen dari APBD sampai tahun 2019	3	2	3	1	2	4	3	5	4	3	5	5	3,33
7	Jumlah guru honorer yang <i>overload</i> dan tidak efektif, jika dilihat dari rasio guru dan murid yang berpengaruh negatif terhadap indeks pendidikan.	4	3	4	2	2	4	4	5	5	5	4	3	3,75

TABEL NILAI KEMUDAHAN MENYELESAIKAN FAKTOR PENGHAMBAT WILAYAH DARATAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kemudahan Menyelesaikan											Rata-Rata	Jml	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketenagaaan	PGRI	Kepala Bappelit bangsa	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekosobud	Kasubid DokRen			Kasubid Ekosobud
1	Proses modernisasi di daerah perkotaan sehingga adab dan rasa hormat siswa ke guru semakin memudar	1	4	3	2	3	2	1	4	3	1	2	2	2,33	3,00
2	Penyebaran Guru belum merata ke wilayah pedalaman dan daerah yang jaraknya jauh dari kota Benteng	3	3	3	3	3	4	2	5	4	3	3	3	3,25	3,67
3	Kompetensi guru yang belum optimal bila dilihat dari nilai UKG tahun 2019	3	3	5	3	3	4	4	4	4	3	2	3	3,42	3,42
4	Terdapat kesenjangan kualitas pembelajaran dan sarana prasarana sekolah antara perkotaan benteng dengan perdesaan	3	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	3	3,33	3,54
5	Tidak ada tunjangan tambahan untuk guru daerah terpencil dan daerah pelosok di kecamatan daratan	4	2	3	3	3	4	3	4	3	4	2	4	3,25	3,29
6	Anggaran pendidikan yang belum mencapai 20 persen dari APBD sampai tahun 2019	4	2	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	3,92	3,63
7	Jumlah guru honorer yang <i>overload</i> dan tidak efektif, jika dilihat dari rasio guru dan murid yang berpengaruh negatif terhadap indeks pendidikan.	4	3	4	3	3	4	3	5	5	4	2	4	3,67	3,71

TABEL NILAI KEKUATAN FAKTOR PENDORONG WILAYAH KEPULAUAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kekuatan											Rata-Rata	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketena gan	PGRI	Kepala Bappel itbang da	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekososbud	Kasubid DokRen		Kasubid Ekososbud
1	Daya tampung sekolah terhadap siswa yang telah memadai	4	4	5	3	4	3	4	5	4	4	4	4	4,00
2	Program bantuan seragam sekolah secara gratis untuk siswa miskin	4	3	5	3	4	4	5	4	2	5	4	3	3,83
3	Rasio guru dan siswa telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan	4	2	5	3	4	5	4	4	4	5	5	4	4,08
4	Kebijakan pemerataan pendidikan oleh pemerintah akan turut mengembangkan pendidikan di kepulauan	3	3	5	3	4	5	4	5	5	4	5	4	4,17
5	Aturan zonasi sekolah akan meningkatkan partisipasi sekolah di kepulauan	4	3	4	3	4	5	3	2	2	4	4	2	3,33
6	Kuota penerimaan CPNS Guru yang lebih banyak di wilayah kepulauan dibandingkan wilayah daratan	4	4	5	4	5	4	4	5	4	4	5	3	4,25
7	Tunjangan khusus dan tunjangan daerah terpencil untuk guru	5	4	5	3	5	5	3	4	3	4	4	3	4,00
8	Pendidikan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD tiap tahun	4	4	5	4	4	4	3	5	4	3	5	4	4,08

TABEL NILAI KEMUDAHAN MENGENDALIKAN FAKTOR PENDORONG WILAYAH KEPULAUAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kemudahan Mengendalikan											Rata-Rata	Jml	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketenagaaan	PGRI	Kepala Bappelit bangsa	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekosobud	Kasubid DokRen			Kasubid Ekosobud
1	Daya tampung sekolah terhadap siswa yang telah memadai	3	3	5	3	3	3	3	4	5	3	4	4	3,58	3,79
2	Program bantuan seragam sekolah secara gratis untuk siswa miskin	4	2	5	3	3	4	5	4	2	4	3	4	3,58	3,71
3	Rasio guru dan siswa telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan	4	2	5	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3,58	3,83
4	Kebijakan pemerataan pendidikan oleh pemerintah akan turut mengembangkan pendidikan di kepulauan	1	3	5	3	3	2	2	5	4	2	4	5	3,25	3,71
5	Aturan zonasi sekolah akan meningkatkan partisipasi sekolah di kepulauan	2	2	4	3	3	2	2	4	3	3	4	3	2,92	3,13
6	Kuota penerimaan CPNS Guru yang lebih banyak di wilayah kepulauan dibandingkan wilayah daratan	1	2	5	4	3	1	2	5	3	1	3	3	2,75	3,50
7	Tunjangan khusus dan tunjangan daerah terpencil untuk guru	2	2	5	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3,00	3,50
8	Pendidikan menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD dan RKPD tiap tahun	5	3	5	4	3	5	5	5	3	5	5	4	4,33	4,21

TABEL NILAI KEKUATAN FAKTOR PENGHAMBAT WILAYAH KEPULAUAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kekuatan											Rata-Rata	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketena gan	PGRI	Kepala Bappel itbang da	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekososbud	Kasubid DokRen		Kasubid Ekososbud
1	Jaringan internet dan jaringan listrik yang belum memadai di beberapa wilayah kepulauan	4	4	5	4	3	5	5	5	3	4	5	4	4,25
2	Kekurangan guru yang berstatus PNS di wilayah kepulauan	5	4	4	4	2	5	5	5	5	5	5	4	4,42
3	Kompetensi guru yang belum optimal bila dilihat dari nilai UKG tahun 2019	3	4	4	3	3	4	4	5	4	3	5	4	3,83
4	Aksesibilitas dan keadaan geografis di wilayah kepulauan yang terpisah yang menyebabkan sulitnya siswa menjangkau lembaga pendidikan	4	3	4	3	3	5	5	5	3	4	5	5	4,08
5	Perumahan Dinas Guru yang tidak ada atau tidak representatif	4	3	4	3	2	4	4	5	3	3	5	4	3,67
6	Mayoritas lembaga pendidikan semua jenjang belum terakreditasi sesuai data Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud	3	3	4	3	3	3	3	5	3	3	4	4	3,42
7	Motivasi anak untuk bersekolah yang kurang dan didukung oleh motivasi dan pola pikir orangtua yang belum menyadari pentingnya pendidikan wajib 9 tahun	5	2	4	2	2	5	5	5	4	5	5	5	4,08
8	Taraf hidup yang rendah dan lapangan kerja yang sebagian bertumpu pada sektor perikanan, sehingga sebagian masyarakat lebih mementingkan bekerja daripada bersekolah	5	3	4	3	2	5	4	5	4	5	4	4	4,00
9	Guru di sekolah pada wilayah kepulauan lebih sering menghabiskan waktunya di wilayah daratan dan jarang berada di tempat tugas	4	3	5	2	3	4	5	5	5	4	5	5	4,17

TABEL NILAI KEMUDAHAN MENYELESAIKAN FAKTOR PENGHAMBAT WILAYAH KEPULAUAN

No	Faktor Pendorong	Nilai Kemudahan Menyelesaikan											Rata-Rata	Jml	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketenagaaan	PGRI	Kepala Bappelit bangsa	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekosobud	Kasubid DokRen			Kasubid Ekosobud
1	Jaringan internet dan jaringan listrik yang belum memadai di beberapa wilayah kepulauan	2	3	2	2	2	2	2	3	3	2	3	5	2,58	3,42
2	Kekurangan guru yang berstatus PNS di wilayah kepulauan	4	4	4	3	2	4	3	5	2	3	3	4	3,42	3,92
3	Kompetensi guru yang belum optimal bila dilihat dari nilai UKG tahun 2019	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	2	4	3,25	3,54
4	Aksesibilitas dan keadaan geografis di wilayah kepulauan yang terpisah yang menyebabkan sulitnya siswa menjangkau lembaga pendidikan	2	3	4	3	3	3	2	4	3	3	2	4	3,00	3,54
5	Perumahan Dinas Guru yang tidak ada atau tidak representatif	4	3	2	3	3	4	4	5	4	4	3	4	3,58	3,63
6	Mayoritas lembaga pendidikan semua jenjang belum terakreditasi sesuai data Badan Akreditasi Nasional Kemendikbud	4	3	2	3	3	3	4	4	3	3	2	4	3,17	3,29
7	Motivasi anak untuk bersekolah yang kurang dan didukung oleh motivasi dan pola pikir orangtua yang belum menyadari pentingnya pendidikan wajib 9 tahun	2	3	3	4	3	2	2	4	4	1	2	4	2,83	3,46
8	Taraf hidup yang rendah dan lapangan kerja yang sebagian bertumpu pada sektor perikanan, sehingga sebagian masyarakat lebih mementingkan bekerja daripada bersekolah	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	2	4	3,00	3,50

No	Faktor Pendorong	Nilai Kemudahan Menyelesaikan											Rata-Rata	Jml	
		Kadis Dikbud	Sek. Dikbud	Kabid Pemb. SMP	Kabid Pemb. SD	Kabid Pemb. Ketenagaaan	PGRI	Kepala Bappelit bangda	Kabid Makro	Kabid Litbang	Kabid Ekosobud	Kasubid DokRen			Kasubid Ekosobud
9	Guru di sekolah pada wilayah kepulauan lebih sering menghabiskan waktunya di wilayah daratan dan jarang berada di tempat tugas	4	3	4	2	3	4	4	5	5	4	3	2	3,58	3,88

**TABEL DATA PANEL FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH
TERHADAP INDEKS PENDIDIKAN**

Kecamatan	Tahun	IP	RGS SD (%)	RGS SMP (%)	RSKS SD (%)	RSKS SMP (%)	RKS SD (%)	RKS SMP (%)
Benteng	2014	61,26	8,421	9,609	0,341	0,398	2,830	3,711
	2015	62,61	6,337	9,426	0,381	0,375	2,874	3,496
	2016	61,85	9,391	9,468	0,358	0,336	3,620	3,529
	2017	61,50	8,854	9,607	0,388	0,328	3,563	3,439
	2018	62,22	9,045	9,158	0,431	0,341	3,984	3,413
	2019	62,93	8,994	7,007	0,425	0,326	4,072	2,879
Bontomanai	2014	58,93	15,019	21,333	1,051	1,143	6,489	4,571
	2015	59,88	10,592	20,772	1,118	1,654	6,908	4,779
	2016	61,05	16,702	16,581	1,350	1,368	7,249	4,444
	2017	60,90	16,214	18,782	1,461	1,354	7,376	5,076
	2018	61,29	15,706	16,171	1,585	1,301	7,853	4,089
	2019	62,18	17,051	12,950	1,690	1,259	8,525	3,777
Bontoharu	2014	60,97	13,989	17,169	0,929	1,205	4,863	4,066
	2015	62,04	11,585	14,900	0,980	1,146	5,130	4,011
	2016	62,43	14,278	17,128	0,971	0,791	4,911	4,216
	2017	61,01	13,397	14,771	0,957	0,784	5,263	4,183
	2018	61,78	13,196	12,204	0,938	0,747	5,441	3,861
	2019	61,77	13,458	7,889	1,104	0,615	5,728	2,869
Bontosikuyu	2014	59,25	13,133	9,231	0,955	1,231	5,253	5,385
	2015	60,62	8,034	8,359	1,112	1,216	5,760	5,471
	2016	60,93	13,034	14,364	1,124	1,094	5,955	5,472
	2017	59,48	14,372	14,670	1,156	1,077	7,324	4,845
	2018	60,97	13,681	13,060	1,209	1,024	6,593	4,353
	2019	61,88	13,967	7,487	1,291	1,070	7,218	4,144
Bontomatene	2014	60,76	16,116	11,983	1,189	1,102	6,737	6,061
	2015	61,82	11,479	13,714	1,545	0,914	7,506	5,143
	2016	61,65	17,415	16,446	1,316	0,796	9,211	4,642
	2017	61,38	19,535	15,435	1,318	0,792	8,217	5,277
	2018	62,87	17,840	14,774	1,360	0,821	8,160	4,925
	2019	62,47	18,002	9,337	1,464	0,812	8,786	4,465
Buki	2014	54,65	22,073	33,333	1,707	3,205	7,317	7,692
	2015	55,44	17,532	18,750	1,818	3,125	7,792	18,750
	2016	56,70	26,237	35,124	1,949	2,066	8,096	4,959
	2017	56,62	27,016	35,772	1,980	2,033	8,487	4,878
	2018	56,95	22,708	28,916	1,975	2,008	8,463	3,614
	2019	58,32	23,469	19,124	2,041	1,992	8,746	3,586

Kecamatan	Tahun	IP	RGS SD (%)	RGS SMP (%)	RSKS SD (%)	RSKS SMP (%)	RKS SD (%)	RKS SMP (%)
Pasimasunggu	2014	54,52	10,706	7,346	0,793	1,185	4,837	4,976
	2015	55,21	5,271	7,159	0,742	1,155	4,529	5,081
	2016	56,13	9,016	10,200	0,745	1,109	4,694	4,878
	2017	56,28	9,003	11,086	0,744	1,131	4,911	5,656
	2018	57,87	8,314	8,515	0,770	0,990	5,158	4,356
	2019	57,98	9,330	6,591	0,848	0,942	5,768	4,520
Pasimasunggu Timur	2014	54,34	11,673	11,207	0,827	1,149	5,055	4,023
	2015	55,14	6,706	10,372	0,888	1,064	5,424	3,723
	2016	56,07	9,824	15,166	0,834	0,948	4,541	3,791
	2017	56,24	10,148	14,286	0,887	0,985	5,616	3,941
	2018	57,11	10,510	12,589	0,955	0,950	5,839	4,038
	2019	57,69	10,587	9,948	1,036	1,047	6,214	4,188
Pasimarannu	2014	53,69	8,523	3,523	0,735	0,587	4,482	5,284
	2015	54,61	3,367	3,579	0,732	0,596	4,466	5,567
	2016	54,76	8,308	8,431	0,762	0,588	4,040	2,941
	2017	56,73	7,467	7,767	0,770	0,583	4,465	2,913
	2018	56,62	6,573	7,249	0,782	0,558	5,321	4,275
	2019	57,84	5,701	5,894	0,792	0,570	5,384	3,992
Pasilambena	2014	53,74	6,449	5,946	0,725	1,351	3,986	4,865
	2015	55,06	3,254	5,476	0,723	1,190	3,977	4,286
	2016	54,92	5,994	9,362	0,759	1,064	4,704	4,255
	2017	56,35	6,211	7,923	0,786	1,071	5,267	4,497
	2018	57,27	5,724	7,277	0,842	1,040	5,724	4,366
	2019	59,06	6,932	6,953	0,924	1,022	5,915	4,294
Takabonerate	2014	54,28	7,383	6,105	0,662	1,474	4,022	5,474
	2015	55,64	2,863	6,392	0,448	1,443	2,725	6,186
	2016	56,51	6,018	10,891	0,626	1,155	4,092	4,620
	2017	56,88	6,121	11,500	0,637	1,167	4,212	4,833
	2018	57,11	5,442	9,501	0,632	1,127	4,227	4,348
	2019	58,36	5,327	6,780	0,660	1,186	4,414	4,407